



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

**“Planning for
a Better Babel”**

RENJA 2018

**Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat, karunia, rahmat dan ridho Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimana mengacu dan berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, e. rancangan Renstra awal 2017-2022 Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Rencana kerja tahun 2018 ini dilaksanakan sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan merupakan bahan usulan dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk usulan kegiatan tahun anggaran 2018. Sehingga diharapkan dengan perencanaan yang baik dan tepat nantinya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dapat ikut dalam mendukung Visi Misi Gubernur 2017-2022.

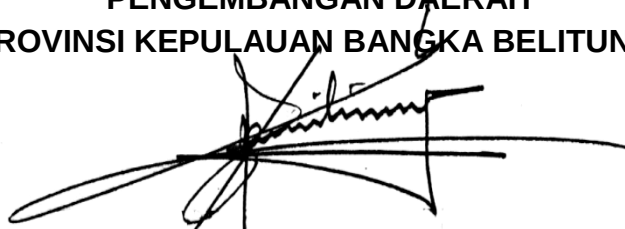
Perencanaan menjadi poin penting dalam suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan akuntabel, sehingga mimpi untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud. Renja 2018 ini juga berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk dapat semakin memperkuat kerjasama segenap tim yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian laporan renja ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh lingkup Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 22 Juni 2017

Pit. KEPALA BADAN

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581010 198303 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	II-20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	II-22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	III-5
3.3 Program dan Kegiatan	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

No	<i>Judul</i>	Hal
II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-3
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-21
II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-26
III.1	Sasaran dan Target Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan Tahun 2018	III-7
III.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan Renja; ketiga pelaksanaan forum PD; dan keempat penetapan Renja. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun rancangan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang pembentukan tim penyusun Renja Bappeda, orientasi mengenai Renja Bappeda, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Bappeda dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahap kedua yaitu penyusunan rancangan Renja disusun mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-

2025 serta Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya. Renja Bappeda juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Tahapan ketiga yaitu membahas rancangan Renja Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan yang juga dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota; menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda; menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penyampaian rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018. Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang menghadiri forum PD untuk selanjutnya hasil kesepakatan ini dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD yang

merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyempurnaan rancangan Renja dilakukan setelah RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan. Setelah disempurnakan kemudian diverifikasi untuk memastikan rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD, untuk selanjutnya Renja Bappeda tahun 2018 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Sebagai lembaga perencanaan, Bappeda diharapkan mampu membantu menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah untuk menciptakannya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Bappeda untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.

Fungsi Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai pedoman Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun anggaran 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dan pencapaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 4 (empat) urusan yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan penataan ruang, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan statistik, dan penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan; dan penelitian dan pengembangan.

Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2016 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2016 maka Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 mencakup 15 program dan 48 kegiatan namun dengan adanya rasionalisasi kegiatan di tahun 2016 maka terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan dan dengan adanya Perubahan Renja Tahun 2016 sehingga pada triwulan IV program yang dilaksanakan sebanyak 14 program dan kegiatan sebanyak 44 kegiatan.

Proporsi Anggaran Perubahan Tahun 2016 yang dikelola BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 20.550.023.532,00 meliputi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Rp 8.707.571.732,00 dan Belanja Langsung Rp 11.875.451.800,00.

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2016 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) Tahun 2016.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. 48 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2016, hanya 44 kegiatan yang dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2016 dan dilaksanakan pada triwulan ke IV. Untuk 44 kegiatan yang dilaksanakan tersebut realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke IV hanya 4 kegiatan yang realisasi kinerjanya dibawah 100% sehingga untuk rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 95,76 % dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan ke IV hanya 17 kegiatan realisasi kinerjanya diatas 90% sehingga untuk rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 69,72 % dengan predikat Sedang (S).

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2015)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	persen	13.120.686.050	100	6.798.417.215	100	3.119.855.000	100	2.871.515.958						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bulan	158.850.000	36	125.250.000	12	17.500.000	12	17.436.360	100,00	99,64	48	142.686.360	80,00	89,82
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	1.679.832.000	36	824.040.000	12	406.800.000	12	352.801.266	100,00	86,73	48	1.176.841.266	80,00	70,06
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	bulan	951.162.000	36	530.700.000	12	178.875.000	12	160.830.000	100,00	89,91	48	691.530.000	80,00	72,70
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	bulan	303.800.000	36	240.800.000	12	30.000.000	12	26.713.000	100,00	89,04	48	267.513.000	80,00	88,06
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	48	bulan	648.350.000	24	354.350.000	12	190.000.000	12	133.500.000	100,00	70,26	36	487.850.000	75,00	75,24

	Penyediaan Alat tulis Kantor	60	bulan	1.133.734.550	36	713.734.550	12	213.400.000	12	213.398.000	100,00	100,00	48	927.132.550	80,00	81,78
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	366.950.000	36	230.450.000	12	64.950.000	12	64.904.500	100,00	99,93	48	295.354.500	80,00	80,49
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bulan	141.000.000	36	78.000.000	12	107.000.000	12	78.238.500	100,00	73,12	48	156.238.500	80,00	110,81
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bulan	298.400.000	36	193.400.000	12	38.000.000	12	37.570.000	100,00	98,87	48	230.970.000	80,00	77,40
	penyediaan bahan logistik kantor	60	bulan	118.450.500	36	44.362.500	12	33.240.000	12	9.755.000	100,00	29,35	48	54.117.500	80,00	45,69
	Penyediaan makanan dan minuman	60	bulan	545.000.000	36	59.093.165	12	100.000.000	12	80.625.750	100,00	80,63	48	139.718.915	80,00	25,64
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bulan	4.302.437.000	36	2.727.437.000	12	825.000.000	12	780.711.928	100,00	94,63	48	3.508.148.928	80,00	81,53864 724
	penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan pelayanan administrasi perkantoran	60	bulan	2.052.720.000	36	676.800.000	12	715.090.000	12	715.090.000	100,00	100,00	48	1.391.890.000	80,00	67,81
	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	24	bulan	420.000.000	-	-	12	200.000.000	12	199.941.654	100,00	99,97	12	199.941.654	50,00	47,61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	5.868.531.000	100	3.249.600.000	100	1.424.130.000	100	1.178.754.550						

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	persen	1.295.650.000	50	869.350.000	100	197.500.000	100	191.339.500	100,00	96,88	150	1.060.689.500	37,50	81,87
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	persen	1.448.581.000	50	464.500.000	100	580.560.000	100	533.950.250	100,00	91,97	150	998.450.250	37,50	68,93
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	bulan	494.631.000	36	429.300.000	12	30.600.000	12	28.851.200	100,00	94,28	48	458.151.200	80,00	92,62
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	persen	2.300.019.000	75	1.261.800.000	100	595.470.000	100	405.408.600	99,64	68,08	175	1.667.208.600	43,66	72,49
	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	60	bulan	329.650.000	36	224.650.000	12	20.000.000	12	19.205.000	100,00	96,03	48	243.855.000	80,00	73,97
6	Program peningkatan disiplin aparatur	100	persen	100.260.000	-	-	100	51.100.000	100	49.490.000						
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	200	stel pakaian	100.260.000	-	-	200	51.100.000	200	49.490.000	100,00	96,85	200	49.490.000	100,00	49,36
4	Program Pengembangan Data/Informasi			6.941.851.000		909.750.000	80	641.459.000	100	328.489.789						
	Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	Data Pokok	1.078.241.000	4	336.200.000	4	305.259.000	4	216.518.030	100,00	70,93	8	552.718.030	66,67	51,26
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80	persen	5.863.610.000	70	573.550.000	75	336.200.000	75	111.971.759	100,00	33,31	145	685.521.759	181,25	11,69

5	Program Kerjasama Pembangunan	80	persen	1.824.230.000	70	1.162.730.000	75	191.070.000	100	123.165.800						
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	22	Kesepa- katan	1.824.230.000	13	1.162.730.000	5	191.070.000	6	123.165.800	120,00	64,46	19	1.285.895.800	86,36	70,49
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	80	persen	332.933.000	70	104.285.000	75	-	100	-						
	Koordinasi pengendalian kawasan tertentu terbatas	15	Rekom- endasi	332.933.000	5	104.285.000	5	-	-	-	-	-	5	104.285.000	33,33	31,32
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	80	persen	1.314.629.100	70	737.523.900	75	211.314.000	100	142.815.805						
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	5	dokume- n	1.314.629.100	3	737.523.900	1	211.314.000	1	142.815.805	100,00	67,58	4	880.339.705	80,00	66,96
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	80	persen	1.199.805.600	70	346.500.000	75	425.740.000	100	264.621.337						
	fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan	80	PNS	1.199.805.600	30	346.500.000	20	425.740.000	15	264.621.337	75,00	62,16	45	611.121.337	56,25	50,94

10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80	persen	12.876.549.750	70	5.472.287.200	75	2.825.366.800		2.380.265.029						
	Penyusunan RKPDP	11	Dokumen	2.034.672.000	5	437.978.200	4	528.520.000	4	491.311.984	100,00	92,96	9	929.290.184	81,82	45,67
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	5	kali	3.541.182.500	3	1.678.304.000	1	707.735.000	1	654.985.885	100,00	92,55	4	2.333.289.885	80,00	65,89
	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5	Dokumen	1.379.095.500	3	698.895.000	1	220.280.800	1	219.480.800	100,00	99,64	4	918.375.800	80,00	66,59
	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	60	bulan	2.251.429.750	36	1.085.431.000	12	400.976.000	12	294.577.366	100,00	73,47	48	1.380.008.366	80,00	61,29
	Penyusunan KUA PPAS	8	Dokumen	1.235.049.000	4	552.339.000	4	352.850.000	4	310.100.000	100,00	87,88	8	862.439.000	100,00	69,83
	Perencanaan Monitoring dan evaluasi kebijakan Satam Emas	60	bulan	1.635.543.000	36	1.019.340.000	12	211.145.000	12	116.816.244	100,00	55,33	48	1.136.156.244	80,00	69,47
	Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025	1	Dokumen	799.578.000	-	-	1	403.860.000	1	292.992.750	100,00	72,55	1	292.992.750	100,00	36,64
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	80,00		875.561.000	70	-	75	634.032.000	75	539.591.202						

	koordinasi perencanaan Bidang ekonomi	1	Dokumen	300.000.000	-	-	1	196.469.000	1	110.307.600	100,00	56,15	1	110.307.600	100,00	36,77
	Penyusunan Tabel Input Output Daerah	1	Dokumen	198.257.000	-	-	1	437.563.000	1	429.283.602	100,00	98,11	1	429.283.602	100,00	216,53
	Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategi Provinsi	1	Dokumen	377.304.000	-	-	-	-			0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	80	persen	2.873.612.500	70	850.000.000	75	695.410.000		412.302.875						
	Perencanaan kependudukan dan sumber daya manusia	15	Dokumen	1.528.800.500	7	500.000.000	4	357.480.000	3	200.007.080	75,00	55,95	10	700.007.080	66,67	45,79
	Perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan di provinsi kepulauan Bangka Belitung	11	Dokumen	1.344.812.000	3	350.000.000	4	337.930.000	4	212.295.795	100,00	62,82	7	562.295.795	63,64	41,81
3	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	persen	537.705.000	100	-	100	200.550.000	100	133.730.035						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup	8	Kali Rakor	537.705.000	-	-	4	200.550.000	4	133.730.035	100,00	66,68	4	133.730.035	50,00	24,87
4	Program Perencanaan Tata Ruang	90	persen	1.364.192.600	75	559.714.100	80	569.795.000	100	366.644.679						

	Koordinasi dan Fasilitas BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34	Kali Rakor	1.364.192.600	14	559.714.100	10	395.960.000	10	298.732.180	100,00	75,45	24	858.446.280	70,59	62,93
	Koordinasi Penyusunan RZWP3K	3	Kali Rakor	613.754.500	-	-	3	173.835.000	1	67.912.499	33,33	39,07	1	67.912.499	33,33	11,07
13	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	80	Persen	1.365.000.000	-	-	75	170.165.000	100	105.139.600						
	Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	6	Laporan	315.000.000			-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi	2	dokumen	525.000.000	-	-	1	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	2	dokumen	525.000.000			1	170.165.000	1	105.139.600	100,00	61,79	1	105.139.600	50,00	20,03
13	Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	83	Persen	2.100.000.000	-	-	75	682.465.000	100	415.432.130						
	Pengembangan Jaringan Penelitian	10	kajian	525.000.000			5	144.615.000	5	57.693.800	100,00	39,89	5	57.693.800	50,00	10,99
	Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	4	jenis penelitian	735.000.000	-	-	2	237.880.000	2	167.356.030	100,00	70,35	2	167.356.030	50,00	22,77

	Kajian Potensi Inovsi Daerah	40	dokumen	840.000.000	-	-	2	299.970.000	2	190.382.300	100,00	63,47	2	190.382.300	5,00	22,66

Berdasarkan hasil capaian kinerja Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik atau sedang dikarenakan untuk realisasi anggaran masih 69,72% namun untuk realisasi kinerja sudah baik atau berpredikat sangat tinggi yaitu 95,76%.

Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Ketidakdisiplinan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam KAK yang telah dibuat.
2. Adanya rasionalisasi anggaran terhadap APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan ditundanya beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.798.999.700,- sehingga pagu menjadi Rp. 11.842.451.800,- untuk belanja langsung.
3. Lamanya penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait Perubahan APBD Tahun 2016 yang ditetapkan pada bulan Oktober Tahun 2016.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012–2017 maka Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan Bappeda adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	%	80	92,31	115,39	Sangat Baik
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	80	77,50	80,31	Tinggi
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	%	77,32	80,56	104,22	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	%	70	100	142,86	Sangat Baik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	Sangat Baik
		Persentase keselarasa Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	Sangat Baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah maka BAPPEDA memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

2.3.1 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi PD Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2016 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah, yang menyebabkan kinerja Bappeda belum maksimal dalam merencanakan pembangunan daerah;
3. Belum tersedia sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator;
5. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum sama pemahaman mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab di lingkungan kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan kewajiban sehingga memunculkan sinergi yang kurang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan kerjasama dengan pihak terkait (Badan Pusat Statistik, Bakorsurtanal, Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dalam Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menyediakan data dan informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Telah memberikan masukan dan saran kepada Gubernur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan percepatan dalam mengisi jabatan fungsional perencana, penelitian dan pengembangan di lingkungan BAPPEDA. Sedangkan berkenaan dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas pegawai, BAPPEDA mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekrutmen maupun pindahan dari unit kerja lain;
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda dilingkup PD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat untuk memperoleh informasi yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a) Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b) Melaksanakan sinkronisasi terhadap pembangunan yang terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar daerah melalui kerjasama dalam sektor pembangunan.

4. Telah dilakukan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota, seperti melaksanakan monitoring dan meninjau ke lapangan proyek-proyek pembangunan, melakukan pertemuan rutinitas setiap triwulan dengan seluruh PD dalam mengevaluasi ketercapaian pembangunan daerah, mengoptimalkan peran musrenbang dari tingkat desa sampai pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
5. Mendorong berkembangnya pemahaman mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab di lingkungan kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga mengedepankan sinergi yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah melalui upaya :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishment*), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis SDM perencana dan Litbang;
 - c. Peningkatan kesejahteraan aparatur dengan memberikan tunjangan perencanaan bagi pegawai Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

2.3.2 Prestasi Kerja

Prestasi kerja yang dicapai Bappeda tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti Pusat, Regional, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Bappeda Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Terjalannya kerjasama antar daerah yang difasilitasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :
 - a. Koordinasi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan;

- b. Koordinasi Kerjasama se-Wilayah Sumatera;
 - c. Koordinasi Kerjasama Kawasan Karimata;
 - d. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Bappeda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Adanya mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang bersifat partisipatif dengan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, perguruan tinggi, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan sektor swasta.
 3. Adanya mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Kebijakan Money Follow Program dengan Pendekatan Pembangunan Holistik, Tematik dan Spasial.
 4. Mendapatkan Nominasi Anugerah Pangripta Nusantara 2016.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Bappeda.

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
0				Non Urusan					Non Urusan					
0	0							5.772.900.000					5.772.900.000	
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	70,75 Skor (Nilai);100 %	5.772.900.000	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	70,75 Skor (Nilai);100 %	5.772.900.000	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	3.000.000.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	3.000.000.000	
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	2.100.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	2.100.000.000	
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Persentase tingkat kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	100%	47.900.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Persentase tingkat kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	100%	47.900.000	
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	60%	450.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	60%	450.000.000	
0	0	8	5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 dokumen	100.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 dokumen	100.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	9 laporan	75.000.000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	9 laporan	75.000.000	
				Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	Provinsi, SKPD	Jumlah Rakornas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	1.000.00.000	Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	Provinsi, SKPD	Jumlah Rakornas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	658.830.000	
3								11.007.065.000					11.007.065.000	
3	33			Perencanaan				8.057.065.000	Perencanaan				8.057.065.000	
3	33	18		Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase	825.000.000	Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase	825.000.000	
3	33	18	1	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti.	4 Dokumen/Rekomendasi /Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	500.000.000	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti.	4 Dokumen/Rekomendasi/Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	500.000.000	
3	33	18	2	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya	Luar Daerah, Provinsi,	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan	4 Dokumen/R	325.000.000	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya	Luar Daerah, Provinsi,	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil	4 Dokumen/Rekomendasi/Lapo	325.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
				dan Pemerintahan II	SKPD	Sinkronisasi perencanaan urusan Perpustakaan dan Trantibbum Linmas serta pada penunjang urusan Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang ditindaklanjuti..	/laporan		dan Pemerintahan II	SKPD	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Perpustakaan dan Trantibbum Linmas serta pada penunjang urusan Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang ditindaklanjuti..	ran		
				Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	1 Dokumen	225.000.000	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	1 Dokumen	225.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	33	15		Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD; Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD; Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti; Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses	80 Persen;80 Persen;65 Persen;80 Persen	5.607.065.000	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD; Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD; Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti; Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses	80 Persen;80 Persen;65 Persen;80 Persen	5.607.065.000	
3	33	15	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 Dokumen	2.495.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 Dokumen	2.495.000.000	
3	33	15	2	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikembangkan	2 Aplikasi	225.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikembangkan	2 Aplikasi	225.000.000	
3	33	15	30	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Provinsi	Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah	6 laporan/rekomendasi	1.185.500.000	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Provinsi	Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah	6 laporan/rekomendasi	1.185.500.000	
3	33	15	4	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	16 Laporan	1.026.565.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	16 Laporan	1.026.565.000	
3	33	15	5	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Sistem Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang dikembangkan	1 Aplikasi	175.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Sistem Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang dikembangkan	1 Aplikasi	175.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	33	15	6	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Persentase Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola	75%	500.000.000	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Persentase Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola	75%	500.000.000	
3	33	16		Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase PD mitra Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase; 80 Persentase	925.000.000	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase PD mitra Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase; 80 Persentase	925.000.000	
3	33	16	1	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti.	4 Dokumen/R ekomendasi /Laporan, Koordinasi dan Sinkronisasi	425.000.000	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendas i/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti.	4 Dokumen/Rek omendasi/Lap oran, Koordinasi dan Sinkronisasi	425.000.000	
3	33	16	2	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti.	4 Dokumen/R ekomendasi /laporan koordinasi dan Sinkronisasi	500.000.000	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendas i/laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen/Rekomendas i/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti.	4 Dokumen/Rek omendasi/lapo ran koordinasi dan Sinkronisasi	500.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	33	17		Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase	700.000.000	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase; 60 Persentase	700.000.000	
3	33	17	1	Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti..	4 Dokumen/R ekomendasi /Laporan/Ko ordinasi dan Sinkronisasi	300.000.000	Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendas i/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti..	4 Dokumen/Rek omendasi/Lap oran/Koordina si dan Sinkronisasi	300.000.000	
3	33	17	2	Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti..	4 Dokumen/R ekomendasi /Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	400.000.000	Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen/Rekomendas i/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen/Rekomendas i/Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti..	4 Dokumen/Rek omendasi/Lap oran Koordinasi dan Sinkronisasi	400.000.000	
				Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	456.110.000	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kepulauan	1 Dokumen	456.110.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
				dan SDA					dan SDA		Bangka Belitung			
3	36			Penelitian dan Pengembangan				2.950.000.000	Penelitian dan Pengembangan				2.950.000.000	
3	36	15		Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase	2.950.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase	2.950.000.000	
3	36	15	1	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Penelitian	6 penelitian	600.000.000	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Penelitian	6 penelitian	600.000.000	
3	36	15	2	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Dokumen/Model Pengembangan Inovasi Daerah	1 Dokumen/Model Pengembangan	400.000.000	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Dokumen/Model Pengembangan Inovasi Daerah	1 Dokumen/Model Pengembangan	400.000.000	
3	36	15	3	Penguatan Jaringan Kelitbangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	ProvinsiJumlah Dokumen/Rekomendasi/Laporan Kelitbangan	3 Dokumen/Rekomendasi /Laporan	650.000.000	Penguatan Jaringan Kelitbangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	ProvinsiJumlah Dokumen/ Rekomendasi/Laporan Kelitbangan	3 Dokumen/Rekomendasi/Laporan	650.000.000	
3	36	15	4	Kajian Science Technology Park	Provinsi	Jumlah kajian Science Technology Park	1 kajian	800.000.000	Kajian Science Technology Park	Provinsi	Jumlah kajian Science Technology Park	1 kajian	800.000.000	
3	36	15	5	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Dokumen Penelitian yang dihasilkan	12 Rekomendasi/ Penelitian	432.100.000	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Dokumen Penelitian yang dihasilkan	12 Rekomendasi/ Penelitian	432.100.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pelaksanaan program/kegiatan ada di PD sesuai dengan sektornya masing-masing

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, b.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, e. rancangan Renstra awal 2017-2022 BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta f. Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Pendekatan Penyusunan RKP RI tahun 2018 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada :

- Pengendalian Perencanaan;
- Penguatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018;
- Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan;
- Penguatan integrasi sumber pendanaan.

Adapun Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun **2018** terdiri dari 10 Prioritas dan 30 Program Prioritas antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru

2. Kesehatan

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

3. Perumahan dan Pemukiman

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

5. Ketahanan Energi

- 13. EBT dan Konservasi Energi
- 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
- 6. Ketahanan Pangan
 - 15. Peningkatan Produksi Pangan
 - 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
- 7. Penanggulangan Kemiskinan
 - 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 - 18. Pemenuhan Kebutuhan dasar
 - 19. Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi
- 8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman
 - 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
 - 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- 9. Pembangunan Wilayah
 - 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - 23. Pembangunan Perdesaan
 - 24. Reforma Agraria
 - 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
 - 26. Percepatan Pembangunan Papua
- 10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
 - 27. Penguatan Pertahanan
 - 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
 - 29. Kepastian Hukum
 - 30. Reformasi Birokrasi

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah “Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agribahari dan Berdaya Saing”. Tahun 2018 merupakan tahun transisi

pergantian jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2012-2017 dengan Gubernur 2017-2022, sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur tersebut, maka pembangunan daerah tahun 2018 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Makna tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. **Kualitas SDM** adalah suatu peranan penting dalam upaya untuk memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. **Mandiri** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.
3. **Pembangunan Ekonomi** dimaknai dengan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui strategi yang dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.
4. **Berbasis agribahari** adalah cerminan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah agri bahari yang dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yaitu pertanian (agrikultur) dan kelautan perikanan. Agrikultur, dimaknai secara luas

meliputi sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan pengembangan potensi peternakan. Sementara itu, kebaharian diterjemahkan tidak hanya terkait dengan hasil perikanan laut saja melainkan juga potensinya di sektor transportasi (pelabuhan) serta kepariwisataan beserta sektor-sektor pendukungnya.

5. **Daya saing** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Penanggulangan Bencana;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana perencanaan pembangunan yang mencakup perencanaan makro secara terpadu, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mendukung perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah serta melakukan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial dan budaya.

Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2018 bidang pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 serta capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2015 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada RENSTRA BAPPEDA tahun 2012-2017, maka rencana program dan kegiatan Bappeda tahun 2017 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja RENSTRA Bappeda. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kinerja perencanaan sebagai upaya mencapai target kinerja Bappeda;
2. Mewujudkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan di atas sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1

Sasaran dan Target Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	80%
	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100%
	Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	80%
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	77,32%
Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	70%
Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)	80%
	Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD (%)	80%

Tabel III.2
Sasaran dan Target Kinerja Bappeda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018			
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	TARGET
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80%
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	80%
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	75%

3.3 Program dan Kegiatan

Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2018 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2018 maka Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 mengusulkan anggaran Belanja Langsung dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 13.722.556.850,- yang terdiri dari 6 program. Adapun Program dan Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. NON URUSAN

1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- f. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- g. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional

B. URUSAN PERENCANAAN

1) Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B) dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
- b. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
- c. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

2) Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD; Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD; Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti; Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

- e. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 - f. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
- Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
 - b. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
- 4) Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B) dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
 - b. Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
 - c. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1) Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah

- b. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- c. Penguatan Jaringan Kelitbangan
- d. Kajian Science Technology Park
- e. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2022. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah : BAPPEDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	70,75 Skor (Nilai);100 %	6.440.435.100			71,25 Skor (Nilai);100 %	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantorann	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani	100 Orang	2.859.675.100	-		100 Orang	3.200.000.000
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	13 Paket	2.220.460.000	-		13 Paket	3.066.546.000
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah Seragam Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah	200 Stel	146.100.000	-		200 Stel	125.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan Kompetensinya	60 Orang	326.720.000	-		60 Orang	550.000.000
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 dokumen	136.025.000	-		2 dokumen	100.000.000
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 laporan	92.625.000	-		7 laporan	75.000.000
0	0	8	7	Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	Provinsi, SKPD	Jumlah Rakornas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	658.830.000	-		0 Kegiatan	0
3												
3	33			Perencanaan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	18		Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase;60 Persentase	664.352.250			85 Persentase;6 5 Persentase	
3	33	18	1	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti.	4 Rekomendasi/Lapor an	266.274.900	-		4 Rekomendasi /Laporan	550.000.000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	18	2	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.	4 Rekomendasi/Lapor an	173.077.350	-		4 Rekomendasi /Laporan	350.000.000
3	33	18	6	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	1 Dokumen	225.000.000	-		1 Dokumen	300.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	15	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD; Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD; Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti; Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses	80 Persen;80 Persen;65 Persen;80 Persen	3.508.712.000			85 Persen;85 Persen;70 Persen;85 Persen	
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	15	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	2 Dokumen	878.780.000	-		2 Dokumen	1.235.000.000
3	33	15	2	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola	2 Aplikasi	119.823.000	-		2 Aplikasi	175.000.000
3	33	15	3	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Provinsi	Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah	6 laporan/rekomendas i	594.360.000	-		10 laporan/reko mendasi	1.304.050.000
3	33	15	4	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun	16 Laporan	412.310.000	-		17 Laporan	1.125.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	15	5	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Elemen Data Perencanaan Pembangunan yang Terisi dan Terbaru	500 Elemen Data	1.379.178.000	-		500 Elemen Data	525.000.000
3	33	15	6	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem	2 Instrumen	124.261.000	-		2 Instrumen	175.000.000
3	33	16		Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	60 Persentase;80 Persentase	584.649.000			65 Persentase;8 5 Persentase	

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	16	1	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti.	4 Rekomendasi/Lapor an	389.059.000	-		4 Rekomendasi /Laporan	440.000.000
3	33	16	2	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti.	4 Rekomendasi/Lapor an	195.590.000	-		4 Rekomendasi /Laporan	525.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	17		Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B)	80 Persentase;60 Persentase	882.328.500			85 Persentase;6 5 Persentase	
3	33	17	1	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti	4 Rekomendasi/Lapor an	159.765.000	-		4 Rekomendasi /Laporan	315.000.000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	33	17	2	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perecanaan dan Evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti	4 Rekomendasi/Lapor an	266.453.500	-		4 Rekomendasi /Laporan	415.000.000
3	33	17	3	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	456.110.000	-		0 Dokumen	0
3	36			Penelitian dan Pengembangan								
3	36	15		Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	83 Persentase	1.642.080.000			85 Persentase	
3	36	15	1	Kajian Science Technology Park	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Teknology Park	1 Dokumen	308.280.000	-		0 Dokumen	0
3	36	15	2	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Penelitian	4 penelitian	380.575.000	-		6 penelitian	630.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	36	15	3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi Daerah	1 Dokumen	234.850.000	-		1 Dokumen	420.000.000
3	36	15	4	Penguatan Jaringan Kelitbangan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Dokumen Kelitbangan	3 Dokumen	286.275.000	-		3 Dokumen	682.500.000
3	36	15	5	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi/Dokumen Penelitian yang dihasilkan	12 Rekomendasi/Peneli tian	432.100.000	-		16 Rekomendasi /Penelitian	1.100.000.000
						TOTAL		13.722.556.850				17.383.096.000

Pangkalpinang, Juni 2017

**Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**


Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda yang disusun dengan berpedoman pada rancangan Renstra awal 2017-2022 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda pada tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta peran aktif stakeholder yang terlibat.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD.

Pangkalpinang, 22 Juni 2017

**Pit. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018**